

Kerajinan dan Pengrajin Narapidana Sebuah Kajian tentang Kreativitas, Komoditi, dan Kompetisi di Era Kapitalisme Mondial¹

Abd. Latif Bustami²

Tulisan ini tentang kerajinan dan pengrajin narapidana di Lembaga Perasyarakat (LP) Klas I Malang, Jawa Timur. Di LP itu, para narapidana yang mempunyai kreativitas dalam kerajinan dilatih mengacu pada standar internasional. Hasil dari kegiatan itu memberi dampak pada peningkatan keahlian narapidana tersebut, dan adanya komoditi yang spesifik 'made in prisoners'. Komoditi itu telah menembus jaringan pasar internasional, yaitu negara-negara ASEAN, Jepang, dan Amerika. Komoditi itu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan yang bisa dijadikan bekal setelah keluar. Keberhasilan LP Malang itu dijadikan model oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Kondisi itu memicu terjadinya kompetisi antarpengrajin dari masing-masing LP dan selera pasar nasional, dan internasional. Masing-masing LP ternyata mempunyai strategi adaptasi terhadap pasar dengan melakukan reinventing sesuai dengan selera pasar. Kajian antropologi terhadap narapidana relatif belum ada. Para narapidana di LP mempunyai pengetahuan, keyakinan, dan nilai budaya yang berbeda dengan anggota dan kelompok masyarakat lainnya.

Key words: lembaga pemasyarakatan, narapidana, Malang, kerajinan, kapitalisme mondial

Kerajinan merupakan kajian yang seksy sehingga menarik perhatian dari berbagai disiplin ilmu. Kerajinan dalam kajian antropologi sering dikaitkan dengan barang-barang eksotik yang dihasilkan oleh para pengrajin dan seniman. Sebagian ada yang mengkaji benda yang

¹ Makalah disajikan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Ke-4 dalam Panel 'Local Handicrafts and Their National and Transnational Consumption: Indonesia, Japan and Asian Countries'. Panel Coordinators: Teruo Sekimoto & Semiarto Aji Purwanto. Terima kasih kepada Bapak Drs. Dedi Sutardi, Bc.IP sebagai Kalapas Klas I Malang yang banyak membantu terlaksananya penelitian ini.

² Abd. Latif Bustami adalah Pengajar di Universitas Negeri Malang

dihasilkan (craft), dimensi ekonomi dari kerajinan (eco-craft), teknologi yang digunakan (tecno-craft), seninya (art-craft), ideasionalnya (ideo-craft), masyarakat pendukungnya (socio-craft) dan kebijakan negara terhadap kerajinan (craft policy). Kajian terdahulu dilakukan dengan prinsip holistik (mazhab Malinowskian), tetapi belum menampilkan etnografi terfokus. Istilah untuk menyatakan hal tersebut adalah Malinowskian membuat etnografi 'kolam' (holistik tetapi dangkal), sedangkan yang terkini membuat 'sumur' (sempit tetapi dalam).

Kajian kerajinan terkini menunjukkan adanya perubahan fokus, ruang lingkup dan penggunaan teknologi. Perubahan selera konsumen terhadap kerajinan, penciptaan jaringan pemasaran kerajinan, kontestasi kerajinan sebagai identitas regional maupun nasional, kerajinan dan gaya hidup, kerajinan sebagai identitas sosial (social life of things), pengaruh jaringan kapitalisme mondial, dan reinventing kerajinan.

Dengan kerangka berpikir ini, kerajinan sebagai komoditi bukan hanya dianalisis dalam konteks ekonomi melainkan juga berada dalam konteks kebudayaan masyarakat (Appadurai, peny.. 1986: 3-63). Penelitian Joel S. Khan pada pengrajin logam di Padang Lawas, Sumatera Barat menunjukkan adanya keterkaitan komoditi dengan mode produksi kapitalis dan mode produksi pertanian sawah keluarga, yang disebut petty commodity mode of production (Khan 1975), Temuan sejenis dinyatakan oleh Russell dan Pooptech pada nelayan di Teluk Thailand (Russell dan Pooptech 1990: 176). Beberapa temuan penelitian itu menyatakan adanya perbedaan pengertian antara barang (goods)³ dan komoditi (commodities) (Milgate 1995). Appadurai menegaskan komoditi merupakan barang dan jasa yang spesifik yang berkaitan dengan cara-cara produksi kapitalis. Pengertian itu hanya bisa digunakan adanya penetrasi kapitalis (Appadurai 1986: 5-7).

Jenis kerajinan sebagai komoditi, keberadaan penjual dan pembeli, tempat transaksi, orang yang terlibat dalam transaksi, waktu transaksi, dan strategi bertransaksi menunjukkan adanya hubungan imperialisme budaya (Tomlinson 1991). Komoditi itu menyatakan adanya relasi dengan kekuasaan identitas sosial (Appadurai 1986), dan gaya hidup (Bourdieu 1984). Dalam memenangkan transaksi sebuah komoditi, pihak yang terlibat menggunakan keyakinan

³ Good berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu gōd, bahasa Persia Kuno gōd, bahasa Jerman Kuno guot, bahasa Saxon Kuno, gōd, dan Noerwegia Kuno, yaitu gōdr yang artinya benda. Komoditi berasal dari bahasa Latin artinya benda yang diproduksi untuk diperdagangkan. Komoditi bukan sekedar barang.,



keagamaan. Komoditi itu merepresentasikan pertarungan antarkeyakinan keagamaan yang menghegemoni masing-masing pihak untuk memenangkan transaksi.

Melalui perolehan penggunaan pertukaran benda-benda, individu-individu, benda-benda itu mempunyai kehidupan sosial yang menyatu dengan pemiliknya (Douglas dan Isherwood 1979; Lury, 1998). Pada dasarnya pergerakan benda-benda sebagai bagian sebuah sistem pertukaran simbolik. Dalam pandangan Douglas dan Isherwood kehidupan sosial mempunyai benda-benda. Benda-benda diberi nilai pemaknaan oleh sesama konsumen. Setiap orang adalah sumber penilaian dan subyek penilaian; setiap individu berada dalam skema klasifikasi dengan diskriminasi yang ia ciptakan sendiri. Suatu dunia yang mereka ciptakan bersama dibangun dari komoditas yang dipilih untuk kemampuan mereka dalam menandai peristiwa, seperti hari kelahiran, pernikahan dan pemakaman, dalam skala bertingkat yang sesuai (Douglas dan Isherwood 1979: 75).

Pemikiran Douglas dan Isherwood dilengkapi oleh Appadurai (1986). Appadurai menjelaskan tentang proses dan cara bagaimana benda menciptakan identitas sosial. Identitas benda bertindak sebagai perantara hubungan antarpribadi. Artinya, kemampuan benda mengubah atau mentransformasikan makna seseorang ke dalam benda secara timbal balik. Benda-benda itu mempunyai kehidupan sosial. Perhatiannya difokuskan pada obyek peredaran benda-benda dengan melihat benda sebagai komoditi yang bergerak. Pergerakan benda-benda yang menghiasi konteks sosial mereka. Alur pertukaran benda akan menjelaskan tentang cara-cara bagaimana hasrat dan tuntutan berinteraksi untuk menciptakan nilai ekonomis dalam situasi sosial tertentu (Appadurai 1986: 4). Lebih lanjut, Appadurai menjelaskan bahwa setiap masyarakat secara budaya dan hukum membentuk jalur yang disepakati untuk peredaran obyek-obyek; kondisi-kondisi yang diciptakan tentang apa yang mungkin dipertukarkan oleh sebuah obyek, oleh siapa, kapan, dan dalam kondisi seperti apa.

Dalam persaingan kekuasaan dan penguasaan komoditi kepada masyarakat maka komoditi yang paling bermakna adalah penggunaan keyakinan keagamaan dan komoditi keyakinan keagamaan. Kekuasaan mempengaruhi pengaktifan komoditi dan begitu juga sebaliknya, yaitu komoditi mengaktifkan kekuasaan. Keyakinan sebagai modal simbolik diaktualisasikan dengan berbagai strategi untuk memperoleh modal ekonomi (Bourdieu 1984). Hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat dengan mendasarkan pada logika posisi-posisi dan kepemilikan sumber daya khususnya atas dasar kepemilikan modal-modal, yaitu modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Di antara berbagai macam modal tersebut, modal



ekonomi dan budaya adalah yang menentukan dalam struktur modal (Bourdieu 1984; Haryatmoko 2003: 10-13).

Kapitalisme mondial yang dihadirkan dengan istilah globalisasi yang berwajah santun' pada hakikatnya sebagai perluasan pasar bagi industri kapitalis dunia atau kapitalisme mondial. Perangkat kebijakan perdagangan internasional berujung pada semakin menguatnya industri negara maju⁴. Dinamika masyarakat masuk ke pusaran internasional semakin menguat melalui migrasi, mekanisme pasar⁵, integrasi pasar⁶ dan ekspansi pasar menuju pasar bebas⁷.

Perusahaan multinational corporations (MNC), pada tahun 1998 di seluruh dunia sejumlah 53.000 dan mempunyai anak perusahaan 450.000 dengan nilai perdagangan 9,5 trilyun dollar AS. Beberapa ratus MNC mempekerjakan sekitar enam juta. MNC sebagian besar bermarkas di AS, Eropa, dan Jepang (36.380 buah) dan sebagian kecil bermarkas di negara sedang berkembang (7.932 buah). Produk, General Motors, Royal Dutch/Shell Group, Exxon, British Petroleum, Hitachi, Ford Motor, IBM, General Electric, Volkswagen, Unilever, Nestle, Toyota, dan Petro Cina menguasai pasaran internasional termasuk Indonesia. Produk unilever misalnya menguasai tubuh masyarakat Indonesia. MNC mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, seperti kasus kenaikan BBM, UMR, dan kebijakan negara pro pasar. Misalnya di Jerman, Menteri Keuangan Oskar Lafontaine tahun 1999 berusaha menetapkan kebijakan kenaikan pajak perusahaan dan langsung mendapatkan tantangan dari perusahaan besar seperti BMW, Daimler-Benz sehingga gagal serta Oskar mengundurkan diri. Lembaga Konsultasi Internasional PERC (Political and Economic Risk Consultancy) menyatakan ada 11 syarat agar negara bisa dinyatakan dengan kategori investor friendly, yaitu biaya sewa, beban pajak, kualitas sistem perpajakan, ada/tidaknya monopoli/kartel, persaingan pemerintah dan swasta, birokrasi, kemudahan mendirikan usaha, hambatan untuk impor, pelanggaran hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum atas HKI dan daya saing regional. Bisa jadi, pemerintah menetapkan kebijakan pro pasar sekaligus menjadi makelar

⁴ Paul Hirst dan Graham Thompson menyatakan globalisasi sebagai sebuah mitos (Hirst dan Thompson 2001). Setiap masyarakat di muka bumi ini pada dasarnya merupakan suatu masyarakat global dan gejala itu sudah berlangsung sejak dulu (Sahlins 1994:387).

⁵ Mekanisme pasar adalah komersialisasi yang menandai pergeseran kultur agraris yang subsisten ke dalam sistem ekonomi pasar.

⁶ Integrasi pasar menyatakan adanya kondisi yang merepresentasikan keterkaitan suatu sistem ekonomi daerah dengan sistem ekonomi nasional dan orientasi nilai nasional.

⁷ Ekspansi pasar menyatakan adanya kondisi yang merepresentasikan keterkaitan suatu daerah dengan tatanan sosial ekonomi nasional menuju sistem ekonomi pasar bebas. Ujung tombaknya adalah perusahaan-perusahaan multinasional (MNC).



kepentingan bisnis MNC. Pemimpin mengabdikan kepada kepentingan internasional daripada kepada rakyatnya bahkan alih-alih demi kepentingan rakyat yang dibuktikan dengan angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi bukan pada aspek pemerataan. Perusahaan MNC merupakan mesin kapitalisme mondial sehingga warga dunia hanya berada dalam sistem ekonomi pasar dunia yang berada dalam sentuhan jari sang penguasa MNC.

Noreena Hertz menyatakan globalisasi mematikan demokrasi 'silent takeover and the death of democracy'. Globalisasi memantapkan ideologi neoliberalisme yang sangat pro pasar dan semua wilayah yang berdaulat di dunia menjadi pasar bebas. Negara dibutuhkan untuk mengintervensi kebijakan pasar bebas dan dalam implementasinya steril dari intervensi negara. Pelopor utamanya adalah Milton Friedman yang dilembagakan melalui IMF dan WTO. Negara sedang berkembang harus membentangkan karpet merah yang panjang untuk kemudahan dan keuntungan pemodal asing.

Negara maju telah melakukan teknologi kotor sebelum abad 20, ketika Indonesia mulai membangun dikenakan kebijakan yang beraneka ragam, seperti hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia, ecolabeling, hak patent. Kebijakan itu hadir sangat mengagumkan tetapi kalau dikritisi lebih dalam ternyata semakin dominannya industri negara maju. Hutan di Eropa sudah mulai berkurang sehingga Indonesia merupakan harapan yang dinantikan. Pengakuan Hak patent mulai dari proses, penentu, dan hasilnya mengabdikan pada negara maju, seperti kasus tempe. Kasus Ziliken yang memiliki delapan paten tempe terdaftar di Amerika. Setelah melakukan penelitian di laboratorium ia menggunakan isoflavon dari minyak tempe untuk obat kanker, padahal tempe semula merupakan produk Indonesia yang dikenal di dunia luar pada masa pendudukan Jepang. Hal serupa juga dialami oleh desain produk dari rotan didaftarkan di Amerika sehingga pengrajin Indonesia yang melakukan ekspor ke wilayah itu dikenakan royalti termasuk industri jamu (Kamil dan Aji 2003: 9-31).

Kajian kerajinan lokal dalam konteks jaringan kapitalisme mondial menjadi lebih bermakna. Di sisi lain, pengrajin lokal yang spesifik yang dikenal dengan narapidana (napi) belum dikaji. Kerajinan napi mampu menembus pasar internasional merupakan realitas yang unik dan menciptakan jaringan ekonomi yang spesifik pula. Pembagian keuntungan antara napi dan LP, strategi LP mencari pasar internasional, jenis dan bentuk kerajinan yang sesuai selera pasar, dan cara mempertahankan kualitas dengan standar quality control termasuk reinventing produknya serta kebijakan negara melindungi dan mempromosikan kerajinan napi itu.



Konteks Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Malang sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertugas untuk melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan³. Mereka masuk ke LP karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam dirinya sehingga menimbulkan masalah pidana, perdata, sengketa administrasi. LP Malang berada di bawah kontrol Ditjen Pemasyarakatan diklasifikasikan sebagai LP Klas I. LP itu merupakan bangunan peninggalan Kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1918.

Luas bangunan LP adalah 50.110 m². Bangunan itu terdiri atas bangunan perkantoran, sarana ibadah, rumah sakit, sarana olah raga (sepaka bola dan bola volley), dapur, bengkel kerja, dan penghuni (nara pidana). Khusus bangunan penghuni terdiri atas kamar besar dengan kapasitas 3 sampai dengan 17 penghuni sebanyak 104 kamar dan kamar dengan kapasitas 1 orang sebanyak 102 kamar. Jumlah narapidana adalah 1870 orang. Pelaku kejahatan yang terbanyak adalah pencurian kendaraan bermotor, togel, dan pembunuhan

Mayoritas narapidana berlatarbelakang petani, pekerja sektor informal, berlatarbelakang pedesaan dengan kebudayaan agraris. Kebudayaan mereka berbasis etika subsistensi, bertatap muka, menekankan pada ritual untuk menghadapi kerawanan ekologis dan kerawanan struktural, keuntungan dibagi bersama yang penting semua warag bisa menikmati. Ketika berada di Lapas mereka tetap melakukan kegiatan yang mengacu kepada kebudayaan mereka yang disesuaikan dengan kondisi Lapas yang membatasi kebebasan mereka dengan sejumlah peraturan. Istilah mereka 'menjadi orang hukuman' yang berbeda dengan 'orang di luaran'. Mereka didistribusikan ke setiap kamar dan masing-masing kamar dipimpin oleh kepala kamar (KM). KM ini dipilih di antara anggota kamar. Dasar penentuan KM biasanya 'jagoan' dan berpengaruh. Pembagian kamar itu kerap terdapat kesepakatan antara petugas Lapas dengan KM. Dalam menentukan anggota kamar, seorang KM mempertimbangkan

³ Istilah Narapidana tidak digunakan dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan Petugas LP Malang. Mereka menggunakan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan atau sering disingkat dengan sebutan warga. Alasannya adalah mengacu pada misi, visi, tujuan, dan program LP. Asumsinya, mereka yang karena keterbatasan-keterbatasannya masuk ke LP yang selanjutnya dibina sehingga kembali bisa diterima kembali oleh masyarakat dengan tangan terbuka. Pembinaan itu terdiri atas kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kesegaran jasmani, sosial kemasyarakatan dan kemandirian. Di sisi lain, istilah pertama merujuk pada kondisi realitas yang dialami seseorang yang penuh stigma (kekerasan, preman, orang jahat), sedangkan istilah kedua lebih santun (*politeness*), efimisme bahasa, dan manusiawi (*more humanistic*). Sementara itu masyarakat menggunakan istilah napi saja karena lebih mudah diucapkan dan akrab. Warga digunakan sebagai bahasa kekuasaan di kalangan aparaturnegara, sedangkan napi digunakan sebagai bahasa populer 'kerakyatan'.



aspek fisik napi baru, yaitu *resik* (kulitnya bersih) dan *letheek* (warna kulit gelap dan agak kotor). Kenampakan ini berkaitan dengan latarbelakang sosial ekonomi napi. Napi baru yang resik cenderung menjadi rebutan. Konsruksi itu menentukan ekonomi mikro mereka di setiap kamar. Asumsinya, napi baru resik dari keluarga mampu sehingga frekuensi membusuknya tinggi. Setiap keluarga yang membesuk membawa oleh-oleh dan uang. Keutungan ekonomis ini yang menentukan penempatan napi baru. Permasalahan yang muncul ketika terjadi tarik menarik antarKM dalam rangka penempatan napi baru diselesaikan dengan cara informal ‘damai’ dan formal.

Temuan Penelitian

1. Kontrol Negara vs Pembinaan Warga

Acuan dalam pembinaan warga adalah kebijakan strategis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Dasar hukum yang dijadikan landasan konstitusional pembinaan narapidana adalah KUHP Pasal 19 dan pasal 24; UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan terutama Pasal 9 yang menyatakan Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan isntansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan ; Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggara Pembinaan dan pembimbngan Warga Binaan Pemasarakatan.

Salah satu bentuk kegiatan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan adalah kerajinan rotan yang mempekerjakan 100 orang napi yang bekerja sama dengan CV Berkat Mandiri. Kegiatan ini diikat dengan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI dengan Direktur Utama PT. Nusantara Meubelindo Industri Nomor: E.PK.0310-43 dan Nomor: 01/NMI-PK/V/92 tanggal 18 Mei 1992 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Industri Rotan Departemen Kehakiman dalam rangka pembinaan ketrampilan Narapidana dari tahun 1992-1997. Kewajiban dan tanggung jawab Dirjen Pemasarakatan meliputi penyediaan lahan dan bangunan, tenaga kerja, menjamin kemanan dan ketertiban di lokasi kerja, dan mencatat keluar masuknya barang. Kewajiban pihak ke III adalah pembinaan proyek bersama, perencanaan dan penyusunan program, penyediaan tenaga instruktur, dan penyediaan alat dan bahan. Pembayaran upah sebesar Rp. 2000,-/hari, makan sekali, dari upah 50% untuk napi, 50% untuk negara Cq Departemen Kehakiman, sedangkan pendapatan bersih sebesar 40% diberikan kepada Ditjen Pemasarakatan. Jangka waktu kerja sama 5 tahun, pekerja



memperoleh jaminan asuransi, dan Ditjen berhak melakukan pemeriksaan mengenai pengelolaan maupun administratif.

Perjanjian itu diperpanjang menjadi Keputusan bersama Dirjen Pemasarakat Departemen Kehakiman RI dengan Dirut PT. Nusantara Meubelindo Industri Nomor: E.PK.0310-16 dan Nomor: K/03/NMI/V/ 1997 tanggal 10 Mei 1997 tentang Perpanjangan Kerjasama Pengelolaan Industri Rotan dalam rangka pembinaan ketrampilan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang dari tahun 1997-2004. Kewajiban dan tanggung jawab Dirjen Pemasarakatan meliputi penyediaan lahan dan bangunan, tenaga kerja, menjamin kemanan dan ketertiban di lokasi kerja, dan mencatat keluar masuknya barang. Kewajiban pihak ke III adalah pembinaan proyek bersama, perencanaan dan penyusunan program, penyediaan tenaga instruktur, penyediaan alat dan bahan, dan pemasaran hasil produksi. Pembayaran upah sebesar Rp. 3700,-/hari, makan siang, dari upah 50% untuk napi, 35% dana pembinaan, 15% disetor ke Ditjen Pas, dan Petugas Lapas diberikan upah sama dengan upah di masyarakat., sedangkan pendapatan bersih sebesar 40% diberikan kepada Ditjen Pemasarakatan. Jangka waktu kerja sama 7 tahun, pekerja memperoleh jaminan asuransi, dan Ditjen berhak melakukan pemeriksaan mengenai pengelolaan maupun administratif.

Keputusan bersama Dirjen Pemasarakatan Depkeh HAM RI dengan Direktur Utama CV Berkat Mandiri Nomor: E. 26.PK.03.10-04 dan Nomor: 001/IV/BM.2004 tentang Kerjasama Pengelolaan Industri Rotan dalam rangka pembinaan ketrampilan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Malang dari tahun 2004-2011. Kewajiban dan tanggung jawab Dirjen Pemasarakatan meliputi penyediaan lahan dan bangunan, tenaga kerja, menjamin kemanan dan ketertiban di lokasi kerja, dan mencatat keluar masuknya barang. Kewajiban pihak ke III adalah pembinaan proyek bersama, perencanaan dan penyusunan program, penyediaan tenaga instruktur, penyediaan alat dan bahan, pemasaran hasil produksi, dan membuang limbah keluar Lapas. Pembayaran upah sebesar Rp. 4500,-/hari, makan 1 kali, dari upah 50% untuk napi, 50% disetor pembinaan dan Petugas Lapas yang diikutsertakan diberi upah sama dengan upah di masyarakat, dan insentif pengamanan tiap malam Rp.10.000,-, sedangkan pendapatan bersih sebesar 40% diberikan kepada Ditjen Pemasarakatan. Jangka waktu kerja sama 7 tahun, pekerja memperoleh jaminan asuransi Jamsostek (Jaminan Sosial tenaga Kerja), dan Ditjen berhak melakukan pemeriksaan mengenai pengelolaan maupun administratif.



Ketiga kesepakatan itu menunjukkan adanya perubahan yang berorientasi pada dominannya peran Lapas, sedangkan nasib pengrajin tetap 50% dan upah yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Khusus, kesepakatan terkini jelas lebih berpihak kepada negara karena lembaga sudah memperoleh 50%, petugasnya memperoleh upah sesuai dengan standar Upah Minimum Rp.25.000, per hari, dan insentif pengamanan tiap malam sebesar Rp. 10.000,-. Padahal pengamanan merupakan bagian dari tugas keseharian Lapas. Bahkan, Ditjen berhak melakukan pemeriksaan mengenai pengelolaan maupun administratif dan tidak berlaku sebaliknya pekerja mengontrol negara.

Pelaksanaan kerja di Lapas Malang berlangsung sejak tahun 1992 yang difokuskan pada kerajinan tangan dengan bahan baku rotan dan kerajinan dari bahan kayu mahoni. Kerajinan rotan berupa keranjang dengan berbagai bentuk ukuran dan fungsi. Misalnya, untuk tempat pakaian kotor, tempat buah, keranjang untuk ke pasar, sedangkan kerajinan dari kayu mahoni berupa meja, lemari hias, dan kabinet.

2. Pekerja atau Mempekerjakan

Narapidana sebagai manusia normal lainnya mempunyai kebutuhan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu manusia bekerja. Dengan sendirinya acuan bekerja bagi narapidana berbeda dengan manusia di luar Lapas. Di dalam Lapas berlaku acuan kebudayaan yang spesifik terdiri atas pengetahuan, keyakinan, dan nilai budaya. Pekerjaan narapidana di dalam Lapas bertujuan mengkondisikan napi menjadi mandiri dan mempersiapkan napi kembali ke masyarakat. Prinsipnya, agar napi tidak kembali lagi ke Lapas. Menurut UU No.12 Tahun 1995 pada pasal 2 dinyatakan sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk napi agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dalam pembnagunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pekerjaan di Lapas merupakan kegiatan yang simultan dan berkesinambungan dengan menerapkan asas *treatment oriented* dan *profit oriented*. Pekerjaan itu mengacu pada The Standard Minimum Rules The Treatment of Prisoners, yang menyatakan bahwa secara ekonomi nilai kerja lembaga terletak dalam pengakuannya bahwa napi adalah seorang warga yang tetap berproduksi. Walaupun harus diakui, pekerjaan itu berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan pimpinan Lapas dan meringankan biaya operasional. Al Gore (1995)'*Common Sense Government Works Better and Costs Less*'



menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan pekerjaan napi sebagai alternative untuk meringankan biaya operasional Lapas.

Temuan penelitian menunjukkan sebagian narapidana memberikan sebagian hasil bekerja mereka kepada petugas sebagai tanda terima kasih. Alih-laih diberikan secara ikhlas bukan menyuap. Mereka mempunyai keyakinan orang berada di Lapas menjalani hukuman dan ujung-ujung mendapatkan keuntungan ekonomi. Sebagian dari hasil mereka dinikmati bersama narapidana dan petugas Lapas. Hasil kerja mereka ditabung dalam bentuk Tabanas yang dikelola oleh petugas Lapas. Petugas Lapas berfungsi sebagai pemegang kontrol dan penjaga keamanan. Tabanas itu diambil ketika narapidana mau keluar. Alasannya adalah uang yang diserahkan ke napi maka langsung digunakan untuk pemenuhan seketika dan bersama-sama (solidaritas).

3. Pengrajin Narapidana

Prasyarat warga yang bisa dilibatkan dalam kegiatan kerajinan produktif adalah keinginan bekerja dari napi yang bersangkutan, masa pidana yang dijalani, mematuhi tata tertib untuk bekerja di perusahaan dan ini ditentukan oleh pihak Lapas dan diputuskan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas Klas I Malang. Penempatan pai disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu bagian penyediaan bahan baku, pembentukan frame, proses anyaman, proses penghalusan, proses finishing dan pewarnaan, dan bagian packing. Jam kerja dimulai jam 07.00 sampai dengan 15.30 WIB diselingi waktu istirahat dari jam 11.30 sampai dengan 12.30 untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Standar operasi pembuatan barang adalah pemilihan bahan baku, pemotongan dan pembentukan frame, proses penganyaman, diampas dasar, pewarnaan, disending (kilat atau dop), ampas sending dan terakhir finishing. Barang-barang yang telah selesai masuk ke bagian quality control (dari CV Berkat Mandiri) dengan standar ekspor. Proses seleksi dilakukan selama 2-3 hari dan kadang-kadang dilakukan langsung oleh pembeli. Saat ini dihadirkan staf ahli dari perusahaan dan dibantu petugas Lapas pada setiap bagian pekerjaan produksi. Kemudian, barang yang dinyatakan berkualitas nasional dan internasional dikemas.

Jumlah produksi setiap bulan adalah 5 kontainer besar. Produk itu dikirim ke Negara Jepang. Menurut informan dari CV Berkat Mandiri, hasil kerajinan napi dari Lapas Klas I Malang paling disukai.



3. Perantara Budaya ‘Proses Pembelajaran’

Dalam konteks jaringan perdagangan kerajinan napi yang bersifat lokal menjadi ‘go international’ menunjukkan adanya peran perantara budaya (*cultural intermediaries*). Perantara budaya terdiri atas Lapas, perusahaan (corporate), buyers, dan perusahaan internasional. Perantara itu membentuk siklus. Artinya, satu institusi lumpuh maka institusi yang lain tidak mampu memproduksi secara maksimal. Lapas berperan sebagai penyedia tenaga kerja dan mengawal (*escorting*) proses dan hasil. Perusahaan nasional berperan sebagai mitra yang membiayai seluruh biaya produksi dan upah, melakukan kontrol kualitas, dan melakukan ekspor kerajinan. Perusahaan itu sebagai katalisator yang mampu menangkap selera pasar dunia dan menerjemahkannya dalam konteks lokal dan konteks lokal dengan selera internasional. Menurut informan, selera internasional di Jepang dominan menyenangi kerajinan lokal. Estetika kerajinan tetap dalam konteks lokal, sedangkan kualitas bahan, proses pengerjaan, produk, dan proses pengirimannya sesuai dengan selera internasional. Transaksi yang dilakukan sebagai proses pembelajaran bagi pengusaha nasional. Pengusaha internasional berperan memperluas pasar internasional yang berselera ‘kerajinan lokal’ (barang antik yang eksotik) dan dibuat oleh pengrajin yang spesifik, yaitu napi yang penuh stigma. Kerajinan eksotik sebagai komoditi di pasar dunia sudah banyak sehingga kompetisinya ketat. Kerajinan yang spesifik dan eksotik itu yang masih terbuka luas adalah kerajinan napi. Kerajinan napi bukan hanya berdimensi ekonomi melainkan berdimensi kebudayaan dan psikologis. Kerajinan itu sebagai proses pembelajaran bagi napi sebelum kembali ke masyarakat dan melatih sikap mandiri. Ketika masyarakat masih mempunyai stigma sosial terhadap napi maka pilihan yang terbaik adalah hidup mandiri. Manifestasi hidup mandiri adalah mengembangkan kerajinan yang telah dilakukan sewaktu berada di Lapas.

4. Kapitalis Komprador’

Interaksi perusahaan dengan masyarakat dikembangkan dalam pemenuhan kebutuhan yang bersifat insidental dan memenuhi rasa keadilan. Artinya, keberadaan program-program tersebut dilakukan untuk menjelaskan dampak kehadiran perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Perusahaan yang meraih keuntungan dan menggulirkan sebagian keuntungan kepada masyarakat sekitar. Pengalaman menunjukkan sebagai lesson



learned bahwa perusahaan yang tidak akrab dengan lingkungan maka sering terjadi konflik sosial sehingga biaya produksi dan biaya sosialnya tinggi.

Perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam pengembangan industri diwajibkan untuk melakukan *community relations (CR)*, *community development (CD)*, dan *social responsibility (SR)*. CR dilakukan oleh perusahaan yang mulai mengembangkan usahanya dengan menciptakan jaringan sosial di lingkungan sekitar perusahaan. CD dilakukan oleh perusahaan yang sudah operasional sehingga sebagian keuntungan digulirkan kepada masyarakat supaya bisa mandiri. *Social responsibility* perusahaan adalah mengembangkan kehidupan masyarakat sekitar dengan cara menggulirkan sebagian keuntungan.

Di sisi lain, terdapat perusahaan yang menjadikan kerajinan sebagai *core* komoditi. Daya tarik komoditi kerajinan yang dikembangkan adalah kerajinan 'made in prisoners'. PT. Nusantara Meubelindo dan CV. Berkat Mandiri merupakan perusahaan-perusahaan yang mengembangkan kerajinan nabi Lapas Klas I Malang sebagai komoditi. Pilihan komoditi sengaja dirancang bukan hanya sekedar untuk tampil beda melainkan sebagai *branding*. Dengan sendirinya, misi perusahaan yang dikedepankan adalah membantu nabi menuju hidup mandiri setelah kembali ke masyarakat. Selera pasar selalu berpihak pada usaha pemberdayaan masyarakat 'etika ekonomi'. Realitas itu dibidik sebagai pangsa pasar yang menjanjikan. Bisnis kerajinan nabi itu mampu meraih keuntungan. Pihak Lapas dan nabi menyediakan tenaga kerja murah 'dipekerjakan', 'dikaryakan' sehingga mampu meningkatkan biaya operasional dan kesejahteraan bersama. Produk nabi dipasarkan di pasar regional dan internasional melalui Pusat Pemasaran Produk Kerajinan di Singosari Malang.

Sebenarnya, berdasarkan logika prinsip ekonomi yang untung adalah perusahaan. Pemasaran produk kerajinan dilepas ke pasaran sampai dengan jumlah keuntungan berada dalam kontrol perusahaan. Keuntungan itu alih-alih untuk pembinaan nabi dan Lapas. Model pembagian keuntungan itu mempertontonkan kapitalisme semu (*ersatz capitalism* dari Kuno) atau kapitalisme berwajah santun. Teori kapitalisme manapun di dunia yang diuntungkan dalam kegiatan produksi adalah pemilik modal. Pemilik modal itu terkonsentrasi di perusahaan. Dengan logika itu, bisa diterima kalau kehadiran MNC menguasai dunia.

Dilema yang dihadapi perusahaan nasional adalah tuntutan untuk mempertahankan perusahaan dan pentingnya perluasan jaringan pasar internasional. Perluasan pasar itu



membawa konsekuensi, yaitu mengundang perusahaan internasional berpartisipasi dan masuknya unsur lokal dalam jaringan pasar internasional. Konsekuensi itu membawa dampak pada keberhasilan kerajinan nabi menembus pasaran internasional di Jepang. Pada prinsipnya, peraih keuntungan terbesar adalah perusahaan multinasional. Perusahaan itu membeli dengan harga relatif murah kepada perusahaan nasional dan menjualnya dengan harga yang menguntungkan kepada konsumen internasional. Transaksi perdagangan itu pasti mengacu pada prinsip ekonomi. Peran perusahaan nasional itu merepresentasikan peran sebagai kapitalisme komprador.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Bachtiar

- 2002 'Pembentukan Etos Kerja dan Budaya Korporasi sebagai Proses Dinamika Kebudayaan'. *Makalah dibacakan pada Forum Kajian Budaya Perusahaan*, Jakarta, 31 Januari 2002

Appadurai, Arjun

- 1990 "Introduction" dalam Appadurai, Arjun (ed), *The Social Life of Things Commodities in Cultural Perspective*, Cambridge: Cambridge University Press

- 2002 "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy", dalam Ina, Jonathan X dan Renato, Rosaldo (ed) *Anthropology of Globalization*, New York; Blackwell Publishers

-----ed),

- 1984 *Social Life of Things: Commodities in New Cultural Perspectives*, Cambridge: Cambridge University Press

Baudlirrad, J

- 1998 *The Consumer Society Myths and Structure*, London; Sage Publications

Bourdieu, P

- 1986 *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Massachusetts: Harvard University Press

Bradley. H.

- 1996 *Fractured Identity: Changing Patterns of Inequality*. Cambridge: Polity Press

Cohen, Abner

- 1969 *Customs and Politics in Urban Africa: A Study of Hausa Migrants in a Yoruba Town*. Berkeley: University of California Press

Di Maggio, Paul

- 2002 "Market Structure The Creative Process, and Popular Culture: Toward an Organizational Reinterpretation of Mass Culture Theory" dalam Spillman, Lyn (ed), *Cultural Sociology*, Massachusetts: Blackwell Publishers, hal. 151-163

Dirks, Nicholas, Geoff Oley, Sherly Ortner (eds)

- 1994 *Cultre/Power/History A Reader in Contemporary Social Theory*, Princeton: Princeton University Press



- Douglas, Mry J dan Isherwood, B
1980 *The World of Goods*, Harmondsworth: Penguin Books, Inc.
- Featherstone, Mike
1980 *Consumer Culture and Posmodernism*, London: Sage Publications
1988 “Budaya Konsumen, Kekuatan Simbolis dan Universalisme dalam Evers, Hans-Disters, *Teori Masyarakat: Proses Peradaban dalam Sistem Dunia Modern*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 53-75
- Foucault.M.
1984 *Power/Knowledge*. New York: Pantheon
- Harrison, Lawrence E dan Samuel Huntington (eds)
2000 *Culture Matters How Value Shape Human Progress*, New York: Basic Books
- Hirst, Paul dan Graham Thompson
2001 *Globaliassi sebagai Mitos*. Terj. Jakarta: PT. Gramedia
- Hokhaeimer, Max dan Theodor Adorno
2002 “The Cultural Identity: Enlightenment as Mass deceptions”, Spillman, Lyn (ed), *Cultural Sociology*, Massachusetts: Blackwell Publishers, hal. 39-46
- Inda, Jonathan X dan Renato, Rosaldo (ed)
2002 *Anthropology of Globalization*, New York; Blackwell Publihers
- Kamil, Sulaeman dan Nugroho Aji
2003 ‘Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Kenakeragaman Hayati’ dalam Sedyawati (peny.). *Warisan Budaya Takbenda Masalahnya Kini di Indonesia*. Depok:Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, hlm. 9-31.
- Kunde, J
2000 *Corporate Religion*. London: Financial Club
- Lury, Celia
1996 *Consumer Culture*, London: Polity Press
- Meyer, Brigitt
2002 “Commodities and the Power of Prayer: Pantecostalist Consumption toward Contemporary Ghana”, dalam Inda, Jonathan X dan Renato, Rosaldo (ed), *Anthropology of Globalization*, New York: Blackwell Publihers, hal. 247-269
- Muhaimin, Y
1990. *Bisnis dan Politik Kebijkasanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Terj.H. Basari dan M. Sugiono. Jakarta: LP3ES
- Robison, Richard dan David S.G.Goodman (eds)
1996. *The New Rich in Asia Mobile Phones, Mc Donalds and Middle-Class Revolution*. London and New York: Routledge
- Sahlins, Marshall
1994a “Cosmologies of Capitalism The Trans Pacific Sector of The World System”, dalam Dirks, Nicholas, Geoff Oley, Sherly Ortner (eds), *Culture/Power/History A Reader in Contemporary Social Theory*, Princeton: Princeton University Press
1994b ‘Goodbye to Trites Tropique: Ethnography in the Conteext of Modern World History’. dalam Borofsky (ed). *Assesing of Cultural Anthropology*. New York: McGraw Hill, Inc, hal. 377-395.



Simmel, Georg

2002 “The Metropolis and Mental Life” dalam Spillman, Lyn (ed), *Cultural Sociology*, Massachusetts: Blackwell Publishers, hal. 28-38

Slater, Don

1996 *Consumer Culture and Modernity*, London: Sage Publications

William, Rhys H

2001 “Instructing the Public Good: Social Movement and Culture Resources”, Spillman, Lyn (ed), *Cultural Sociology*, Massachusetts: Blackwell Publishers, hal. 289-299

